

## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI SDN INPRES TANJUNG RIA KOTA JAYAPURA

Evin Silubun<sup>1)</sup>, Nur Aedah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*The Smart Indonesia Program through the Smart Indonesia Card Program is a priority program of the President of the Republic of Indonesia, Ir. Joko Widodo is specifically designed to help children from poor or disadvantaged families to continue to get education services until they have finished secondary education or equivalent. The purpose of this study is to be able to analyze the implementation of the KIP program and identify things / factors that influence the implementation of the program, seen from George Edwards III aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews (in-depth interviews), observation, and documentation studies. The results of the study showed that the implementation of KIP in Tanjung Ria SDN Inpres Kota Jayapura seen from the aspect of communication had not been effective. This can be seen from the lack of level of understanding of information from the recipient to the executor which contains clarity, among others: The absence of a Technical Guide, and the absence of Standard Operating Procedures for the implementation of the policy in the school. Viewed from the aspect of resources (human and financial), it is not effective. This can be seen from the lack of professional management human resources, and the process of channeling funds that are not yet on target. Viewed from the aspect of disposition (attitude of the implementer) shows the executor's responsibility to the recipient. This can be seen from the fact that the recipient is not yet satisfied. And from the aspect of bureaucratic structure the results showed that the management team that had been formed had not run well within the Tanjung Ria SDN Inpres Jayapura City. Supporting factors: communication, support, equipment resources, and information. The inhibiting factors: communication, capital resources and data accuracy*

### Abstrak :

*Program Indonesia Pintar melalui Program Kartu Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis implementasi program KIP dan mengidentifikasi hal-hal / faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut, dilihat dari George Edwards III aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP di SDN Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura dilihat dari aspek komunikasi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tingkat pemahaman informasi dari penerima sampai kepada pelaksana yang memuat kejelasan antara lain: Belum adanya Petunjuk Teknis, dan tidak adanya Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah. Dilihat dari aspek sumber daya (manusia dan finansial) kurang berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas sumber daya manusia pengelola profesional masih kurang, dan proses penyaluran dana yang belum tepat sasaran. Dilihat dari aspek disposisi (sikap pelaksana) menunjukkan pertanggung jawaban pelaksana kepada penerima. Hal ini dapat dilihat dari bahwa penerima belum merasa puas. Dan dari aspek struktur birokrasi hasilnya menunjukkan bahwa tim pengelola yang sudah dibentuk belum berjalan baik dalam lingkungan SDN Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura. Faktor yang mendukung: komunikasi, dukungan, sumberdaya peralatan, dan informasi. Faktor yang menghambat: komunikasi, sumber daya modal dan akurasi data.*

**Keyword: Implementation, Smart Indonesia Program, Smart Indonesia Card, Jayapura**

## PENDAHULUAN

Menurut Mulyasa (2011:2), pendidikan adalah proses pematangan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat dan kemampuan. Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam penerapan program Indonesia pintar, Indonesia sehat dan Indonesia sejahtera memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya mulai dari pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, UU Nomor 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa janji-janji presiden saat kampanye pemilihan presiden wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kewajiban negara memberikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Kartu Indonesia Pintar yaitu Tujuan Program KIP, Sosialisasi Program KIP, Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data, Mekanisme Penyaluran Dana, Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Penggunaan Dana (Kemendikbud Dirjen Dikdasmen, 2015).

Program Kartu Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya tentang biaya

administrasi sekolah dan menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak putus sekolah program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah sekolah agar kembali bersekolah. Lebih luasnya lagi, program dalam KIP ini sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun (Kemendikbud Dirjen Dikdasmen, 2015).

Kartu Indonesia Pintar yang melalui Program Indonesia Pintar tersebut membekap siswa yang dalam hal ini masuk dalam kategori miskin, untuk itu ada siswa yang tidak mempunyai kartu bisa mendapatkan dana itu yang disebut siswa PIP dan siswa yang memiliki kartu mendapatkan dana itu juga yang disebut siswa KIP. Dalam hal ini siswa PIP juga bisa mendapatkan dana Program Indonesia Pintar dikarenakan masuk dalam kategori persyaratan Keluarga Harapan (PKH), anak yatim-piatu dan korban bencana hal ini dapat membuat sekolah dapat mengusulkan siswa tersebut untuk dapat ambil bagian dalam Program Indonesia Pintar tersebut tanpa memiliki Kartu Indonesia Pintar (Rohaeni, & Saryono, 2018).

SD Negeri Inpres Tanjung Ria merupakan salah satu sekolah yang menyelenggarakan program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik. Sekolah ini terletak di Tanjung Ria Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua.

Berdasarkan data dari SD Negeri Inpres Tanjung Ria tahun 2016. Jumlah penerima beasiswa adalah 326 siswa. Bantuan tersebut terdiri dari peserta didik telah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 126 siswa, dan peserta didik yang tidak/belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun terdaftar dalam

Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 200 siswa.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan permasalahan pada siswa yang mendapat beasiswa di SD Negeri Inpres Tanjung Ria. Salah satu permasalahannya adalah tidak semua siswa mendapatkan dampak positif setelah mendapatkan beasiswa. Tidak semua kinerja belajar siswa SD Negeri Inpres Tanjung Ria meningkat setelah mendapatkan beasiswa. Ada pula kinerja belajar beberapa siswa SD Negeri Inpres Tanjung Ria menurun setelah mendapatkan beasiswa. Faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja belajar adalah kekurangmampuan siswa dalam bidang akademik, kurang motivasi dan disiplin belajar, dan kemalasan belajar siswa.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk dapat menganalisis implementasi program kartu indoensia pintar di SD Negeri Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura. Fokus yang diselidiki adalah implementasi program kartu indoensia pintar, dengan dimensi: (a) komunikasi (b) sumber daya (c) disposisi (d) struktur birokrasi.

Data-data hasil penelitian diperoleh dari berbagai sumber guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu 1) data primer seperti Kepala sekolah, Guru pelaksana, Siswa, Orang tua/wali, dan RT/RW. 2) data sekunder sumber datanya diperoleh dari kajian literatur, studi kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta arsip-arsip yang terkait dengan fokus penelitian.

Untuk memperoleh data yang obyektif pada penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu: 1) wawancara 2) observasi dan 3) dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengembangan instrument, khususnya pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan yaitu merumuskan fokus masalah dan indikator dari masing-masing fokus

penelitian, membuat daftar pertanyaan dengan berpedoman pada diskripsi fokus masalah, dan mengkaji dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan selanjutnya dokumen direvisi ulang (Sugiyono, 2008; Nawawi, 2003).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman (1992:16), yang terdiri atas: (a) Reduksi Data (b) Penyajian Data (c) Penarikan kesimpulan / verifikasi data.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SDN Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura

Menurut Anderson (2012: 8) menyatakan kebijakan itu ialah suatu "*purposive course of action or inaction under taken by an actor set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi). Defenisi yang diberikan oleh Rusli (2013) Kebijakan Publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dikatakan sebagai modal utama karena hanya melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hokum untuk mamanej masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun memaksa, akan terjadi sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas. Kalau di Indonesia bukan hanya sekedar undang-undang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi Negara yang memberikan kewenangan itu sehingga kebijakan publik memiliki kekuatan otoritatif (Santoso, 1993).

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn ini, Winarno (2008:146)

menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasi keputusan-keputusan menjadi pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi: Pengertian, Landasan hukum, Tujuan, Sasaran, Besaran Dana, Sumber Dana, Pemanfaatan Dana, Mekanisme Penetapan dan Penyaluran KIP, Mekanisme pengambilan KIP, dan Tugas dan tanggung jawab sekolah.

Kartu Indonesia Pintar yang melalui Program Indonesia Pintar tersebut membekap siswa yang dalam hal ini masuk dalam kategori miskin, untuk itu ada siswa yang tidak mempunyai kartu bisa mendapatkan dana itu yang disebut siswa PIP dan siswa yang memiliki kartu mendapatkan dana itu juga yang disebut siswa KIP. Dalam hal ini siswa PIP juga bisa mendapatkan dana Program Indonesia Pintar dikarenakan masuk dalam kategori persyaratan Keluarga Harapan (PKH), anak yatim-piatu dan korban bencana hal ini dapat membuat sekolah dapat mengusulkan siswa tersebut untuk dapat ambil bagian dalam Program Indonesia Pintar tersebut tanpa memiliki Kartu Indonesia Pintar.

Adapun makna implementasi kebijakan menurut Nugroho (2008:432) sebagaimana dikutip dalam Rusli (2015:84) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan.

Untuk itu dalam membedah implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar di SDN Tanjung Ria

menggunakan model implementasi dari Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: (a) Komunikasi (b) Sumber daya (c) Disposisi atau perilaku (d) Struktur Birokratik. Berikut pemaparannya :

### **Aspek Komunikasi**

Hasil penelitian terhadap aspek komunikasi dalam implementasi program kartu indonesia pintar di SD Negeri Inpres Tanjung Ria berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan berada dalam kondisi tidak efektif. Kurangnya pemahaman informasi dari penerima sampai kepada pelaksana yang memuat kejelasan antara lain: Belum adanya Petunjuk Teknis, dan tidak adanya Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah.

Program yang dilakukan oleh bagian TU (Tata Usaha) yang sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap program indonesia pintar melalui program kartu indonesia pintar. TU belum mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kartu indonesia pintar untuk semua peserta didik yang menerima kartu indonesia pintar. Program Kartu Indonesia Pintar belum dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin.

Kurang adanya sosialisasi mengenai keterkaitan program kartu indonesia pintar dengan masyarakat lainnya, seperti dinas /sekolah /kelurahan /RT, dan lembaga terkait kepada masyarakat, proses pendataan awal siswa didik penerima kartu indoensia pintar dilingkungan sekolah ditandai dengan tidak adanya standart operasional prosedur yang optimal (hanya sekedar tautan biasa), sebagian siswa miskin belum mengetahui. Padahal program kartu indonesia pintar adalah salah satu program yang dibentuk untuk membekap seluruh siswa miskin sehingga menjadi program lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas dan mutu yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini program KIP di lingkungan SD Negeri Inpres Tanjung Ria

baru menyentuh permukaan saja, yaitu terbatas pada pengembangan dan pengimplementasian program-program bantuan yang baru pada beberapa tahapan berjalan.

Fenomena tersebut diatas, menunjukkan sebagian kecil persoalan yang muncul dalam implementasi program KIP di SD Negeri Inpres Tanjung Ria. Tidak adanya standart operasional prosedur program KIP (petunjuk teknis atau sejenisnya) yang menjelaskan sasaran implementasi program KIP dan keterkaitannya dengan sasaran SD Negeri Inpres Tanjung Ria, kurangnya sosialisasi program untuk identifikasi kebutuhan, dan evaluasi terhadap dukungan program KIP bagi kegiatan-kegiatan dalam lingkungan SD Negeri Inpres Tanjung Ria, serta belum dapat menjangkau seluruh peserta didik miskin belum memiliki kartu indonesia pintar yang bersekolah di SD Negeri Inpres Tanjung Ria.

### **Aspek Sumber Daya**

Sumber daya manusia pengelola program kartu indonesia pintar di TU SD Negeri Inpres Tanjung Ria beberapa memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai aplikasi program KIP berdasarkan pengalaman dan pelatihan. Beberapa dari sumber daya manusia pengelola memiliki latar belakang pendidikan beragam dan tidak berhubungan dengan aplikasi program bantuan. Mereka terdiri dari beberapa pengelola yang berstatus guru, dibantu oleh beberapa pegawai non pns yang mengisi divisi yang ada, seperti divisi administrator, divisi program (Rochman, 2014).

Hal inilah yang ditekankan oleh Edwads III (Widodo,2009:107) bahwa "sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan". Faktor mutu sumber daya manusia pengelola program KIP merupakan salah satu faktor penentu. Sebaik atau selengkap apapun sarana dan prasarana yang disediakan lembaga dalam membantu pekerjaan manajerial ataupun

operasional, tidak akan berarti atau memiliki manfaat yang sedikit jika SDM yang melaksanakan, mengoperasikan, atau mengelola peralatan yang digunakan tersebut kurang memadai. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, SD Negeri Inpres Tanjung Ria akan kehilangan momentum untuk mendapatkan dukungan dari program KIP. Tidak adanya sistem untuk identifikasi kebutuhan terhadap dukungan program KIP bagi kegiatan-kegiatan sekolah (masih banyak siswa miskin yang belum memiliki kartu indonesia pintar).

Sumber daya finansial program kartu indonesia pintar di TU SD Negeri Inpres Tanjung Ria diketahui dana program KIP belum tepat sasaran, baik siswa dari kelas 2 sampai kelas 6 yang tidak ideal: dana yang tidak sesuai, dana yang terbatas. Perlu adanya evaluasi kembali terhadap kemanfaatan yang dibutuhkan oleh peserta didik.

Dengan keberadaan program KIP pihak sekolah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Perlu membuat daftar prioritas siswa yang membutuhkan, sebelum itu sebaiknya juga mengevaluasi kembali spesifikasi peserta didiknya. Perlu adanya penajaman untuk membedakan antara mana yang menjadi siswa yang kebutuhan pokok dan yang menjadi siswa yang kebutuhan sekunder, karena proses pengadaan sarana dan prasana program KIP harus mengikuti sistem pusat pada umumnya (sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku), sehingga tidak semua peserta didik program KIP dapat diadakan dengan segera.

### **Aspek Disposisi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan identifikasi peserta didik dan pemilihan petugas pelaksana yang sesuai dengan lingkungan sekolah. Disamping memberikan pertanggung jawaban kepada peserta didik, pelayanan yang diberikan petugas pelaksana kepada peserta didik belum sepenuhnya sesuai standart atau aturan sehingga menimbulkan peserta

didik belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Hal ini yang menjadi resistensi sikap pelaksana adalah fasilitas untuk menunjang kegiatan berlangsung tersebut masih kurang, komitmen dari kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua/wali belum searah sehingga hal tersebut belum terasa maksimal. Tujuan dasar pemanfaatan program KIP adalah untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah dan menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah.

Apa yang dulu tidak bisa dilakukan, sekarang hal ini menjadi mungkin karena bantuan program KIP tersebut.

Dari fenomena tersebut di atas, maka keterjangkauan antar peseta didik dan personalia pengelola program KIP harus lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu menghadapi hambatan dalam pelaksanaan program KIP tersebut dan menjadi lebih transparan dan sesuai standart atau aturan yang berlaku.

### **Aspek Struktur Birokrasi**

Hasil penelitian terhadap aspek struktur birokrasi dalam implementasi program kartu indonesia pintar di SD Negeri Inpres Tanjung Ria berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan pada dasarnya telah berjalan baik, meskipun demikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan. Penempatan tenaga pengelola untuk KIP belum sesuai dengan petunjuk teknis sehingga struktur organisasi tim pengelola KIP belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam buku pedoman petunjuk pelaksanaan KIP, bahwa tujuan khusus KIP adalah membantu siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu dimaksudkan agar mereka dapat menikmati layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan berkualitas umum untuk membiayai kegiatan operasional sekolah dan murid menerima manfaat. Akibatnya dari jumlah

siswa/siswi yang berasal dari keluarga miskin maupun tidak mampu belum seluruhnya memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

Berdasarkan hasil kajian perlu adanya kesadaran bagi tim pengelola KIP dalam memberikan pelayanan sesuai dengan petunjuk teknik dan penempatan tenaga pengelola seharusnya sudah harus berjalan efektif dan memadai.

Secara konsep atau menurut buku pedoman pelaksana program KIP bahwa pencairan dana bos dilakukan satu tahap atau setahun sekali dan pencairan dana KIP diterima pada ajaran baru yaitu bulan agustus. Akan tetapi dalam prakteknya pencairan dana KIP sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Seperti untuk dana KIP tahun 2016 tahap pertama Agustus - Januari 2016 baru dapat cair perdana pada triwulan pertama. Sehingga hal ini menjadikan masalah bagi sekolah sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi persoalan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencarikan dana berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.

### **Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di SDN Inpres Tanjung Ria Kota Jayapura**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain dukungan orangtua, infomasi, kerjasama antara pengelola dan warga sekolah, dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jan merse dalam M. Hasbullah(2015:95) terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan dan pembagian potensi. Informasi hendaknya diberikan secara terus menerus agar tidak terjadi distorsi tentang kebijakan yang dirumuskan. Informasi yang menjadi faktor penunjang disini ialah terkait penggunaan KIP dan Surat Ketetapan (SK) tentang

penerima PIP yang disebarluaskan melalui internet oleh Pemerintah Pusat dan Sekolah Terkait. Informasi terkait penggunaan kartu merupakan informasi awal bagi penerima KIP sehingga adanya informasi tersebut membantu penerima kartu, dalam kartu tersebut berisi alur yang dilakukan setelah menerima kartu.

Informasi yang jelas dan lengkap penting bagi guru pengelola terutama mengenai SK penerima PIP, guru pengelola mendownload dan memberikan informasi ke peserta didik yang bersangkutan dan Sekolah Terkait juga mempublikasikan informasi tentang SK Penerima dan jadwal pencairan dana di web sekolah terkait.

Dukungan dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Dukungan yang diberikan orangtua ke sekolah seperti orangtua melapor ke guru pengelola kalau anaknya mempunyai KIP, sehingga adanya laporan dari orangtua tersebut membantu sekolah dalam pengusulan calon penerima PIP. Faktor yang ketiga adalah adanya kerjasama antara pengelola dengan warga sekolah, kerjasama tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PIP. PIP menjadi tugas guru pengelola tetapi dalam pelaksanaannya guru pengelola dibantu oleh admin dan bendahara sekolah.

Sementara untuk pembuatan surat keterangan kepala sekolah menjadi tanggungjawab kesiswaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) pada variabel hubungan antar organisasi bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak lain oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan program tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program Kartu Indonesia Pintar di

lingkungan SD Negeri Inpres Tanjung Ria, maka dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Negeri Inpres Tanjung Ria dari aspek komunikasi, KIP dikomunikasikan pada event-event tertentu dengan mengundang kepala sekolah, sekolah mengkomunikasikan KIP secara lisan ke peserta didik sehingga memahami informasi. Dari aspek sumberdaya peralatan, sumberdaya peralatan sudah cukup dan membantu dalam pelaksanaan KIP antara lain komputer dan wifi. Jumlah pengelola KIP di SD Negeri Inpres Tanjung Ria sudah cukup yaitu 2 orang guru pengelola dengan dibantu oleh admin dan bendahara, dan segi penyaluran dana belum tepat sasaran, diberikan mengenai pengusulan dan pencairan dana sudah harus jelas. Dari aspek disposisi sikap pelaksana kepada peserta KIP sebagai siswa/siswi didik yang merasa belum puas hal ini perlu mengoptimalkan kembali resistensi sikap tersebut. Dan aspek struktur birokrasi yaitu harus kembali mengevaluasi tim pengelola di lingkungan sekolah yang sudah dibentuk.

*Kedua*, Faktor pendukung pelaksanaan PIP adalah adanya dukungan dari orangtua berupa orangtua lapor ke sekolah kalau mempunyai KIP, adanya kerjasama antara guru pengelola dengan admin dan bendahara sekolah, adanya koordinasi antara pengelola di tingkat pusat, daerah dan sekolah, fasilitas yang disediakan sekolah sudah memadai, dan informasi yang jelas. Dan Faktor penghambat pelaksanaan PIP kurangnya komunikasi antara lembaga penyalur dengan sekolah terkait pengambilan dana, kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP, dan akurasi data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. Holt, Reinhart and Winston Aksara, Jakarta.
- Rusli, B. (2013).. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Nawawi, H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing Malang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2015). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP)*. Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Jakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. Rohendi,. Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, strategi dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho R. D. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Rohman, A. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Santoso, A. (1993). *Analisa Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV, Alfabeta.
- Van Meter & Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Van Meter and Van Horn, Amsterdam.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.